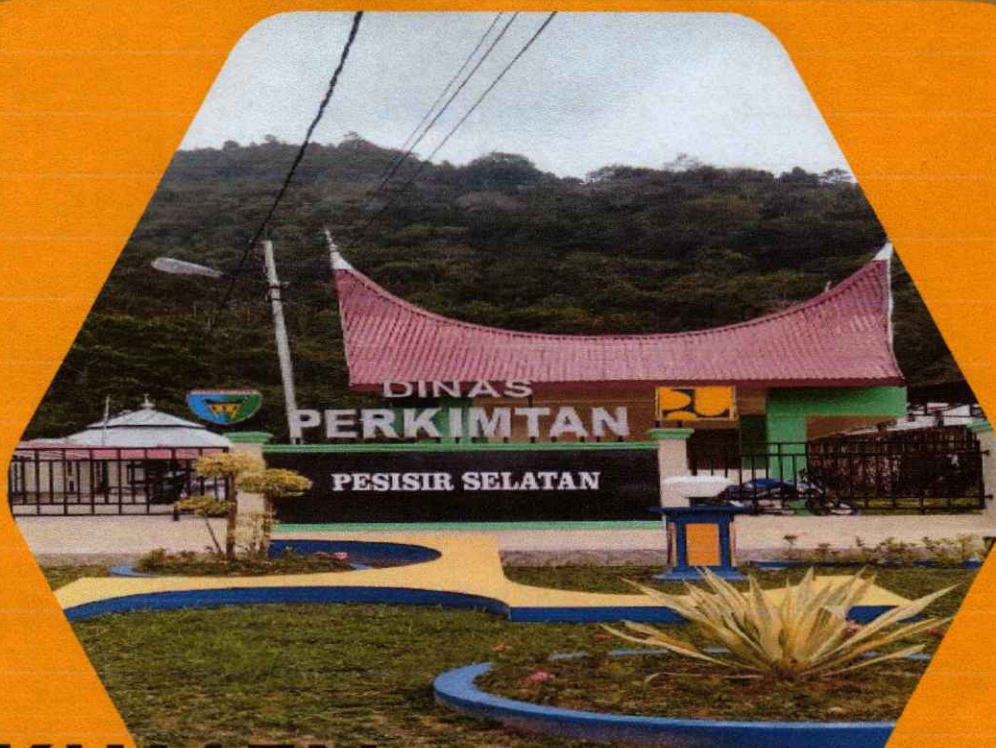


**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



DOKUMEN

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dapat terselesaikan.

Dengan tersusunnya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 merupakan wujud kepedulian OPD dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu daerah otonomi. Selain itu sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang kearah yang lebih baik sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021.

Kami berharap semoga Rencana Kerja (RENJA) ini bermanfaat, terutama sebagai sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan yang semakin baik. Semoga Allah SWT senantiasa selalu membimbing kita, Amin.

Painan, Juni 2020

**KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KAB. PESISIR
SELATAN**


MUKHRIDAL, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640128 199309 1 001



DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	6
I.3. Maksud dan Tujuan	9
I.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2017	12
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	12
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
II.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	16
II.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	20
III.1. Telaah Terhadap RKPD Tahun 2021	20
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	21
III.3. Program dan Kegiatan	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
BAB V PENUTUP	
V.1. Kaidah Kaidah Pelaksanaan	29
V.2. Rencana Tindak Lanjut	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka legislasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD. Dengan demikian RENJA OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam

suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.421) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusun, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 lampiran VI tahapan dan tata cara penyusunan rencana kerja satuan perangkat daerah (RENJA OPD) bahwa penyusunan RENJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 berpedoman kepada RENSTRA Revisi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tahun 2017-2021.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 08 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, Rencana Kerja OPD merupakan turunan dari Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 dengan Visi Kabupaten Pesisir Selatan **MEWUJUDKAN**

MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA.

Visi ini merupakan suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah, dan tujuan organisasi yang realistis. Visi dapat memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya.

Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh di masa mendatang.

Sebagai upaya pencapaian visi, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.

5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Dari ke lima misi Kabupaten Pesisir Selatan tersebut di atas, maka **misi kedua** adalah misi yang harus diemban Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Misi kedua tersebut untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah

Berdasarkan konteks tersebut maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merumuskan visi organisasi yaitu :

“Penataan permukiman kumuh, Ketersediaan rumah tidak layak huni, dan terwujudnya kepastian hukum pemilikan tanah di kabupaten Pesisir Selatan”

Adapun Misi dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penterjemahan dari Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Pembangunan perumahan yang layak huni dan bebas kumuh;
2. Pembangunan perumahan untuk mengurangi tingkat *backlog* dengan pembangunan perumahan hunian berimbang;
3. Penyediaan hunian vertikal untuk MBR;
4. Peningkatan kualitas permukiman kumuh Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Pembangunan infrastruktur kawasan permukiman memenuhi standar pelayanan minimal;
6. Pembangunan kawasan permukiman berwawasan lingkungan berkelanjutan dan memenuhi ketentuan penataan ruang;
7. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang didukung oleh

kesiapan dan kerjasama kelembagaan pemerintah, swasta dan masyarakat;

8. Menyediakan lahan yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur di Kabupaten Pesisir Selatan;

Program dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan disesuaikan dengan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan adalah suatu hal yang dijadikan dasar acuan pencapaian target kinerja dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Kerja tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk mengarahkan organisasi di dalam mencapai mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran atau turunan dari visi dan misi organisasi.

Rencana kerja merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak- pihak yang terkait dan berkepentingan (masyarakat/publik, DPRD, departemen/instansi yang terkait, lembaga swadaya masyarakat, dll) di dalam mempertanggung jawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam rencana kerja.

Rencana kerja juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu di dalam mengambil keputusan dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Rencana kerja membantu pengambil keputusan di dalam memformulasikan dan mengkomunikasikan secara jelas strategi yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama.

Rencana Kerja ini wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen-elemen tersebut untuk memajukan Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya, sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang didukung oleh tegaknya

penegakan hukum (*law enforcement*) dan diterapkannya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good government*) di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memajukan Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana Kerja dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, meliputi beberapa program kerja yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur;
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
6. Program Pengembangan perumahan;
7. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
8. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
9. Program Pengembangan Sistuim Informasi Pertanahan
10. Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 antara lain :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Jis Undang – Undang Drt Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang – Undang Nomor 58 tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58., Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 - 2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 -2021
17. Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 - 2030
18. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat Daerah
19. Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum No 02/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2015 -2019
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2016 yang berisi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan utama dari pembuatan rencana kerja adalah untuk membangun sebuah rencana kerja yang disusun dengan menggunakan pendekatan Sistem Manajemen Strategis (*Strategic Management System*) yang sifatnya sistemik dan sistematis dan mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional yang tertera pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004.

Rencana kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*chek and balance*) kewenangan atas kegiatan- kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini juga diharapkan

dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun tujuan adanya rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera;

1. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;

2. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;

3. Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi;

Rencana Kerja ini juga dijadikan bahan acuan untuk :

1. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan OPD;
2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik (LAKIP).

1.4 Sistematisa Penulisan

Penyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini mengacu pada panduan tata cara penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Sistematisa penyusunan

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- II.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD
- II.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

- III.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- III.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah Pelaksanaan
- c. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan pertanahan Kabupaten pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, dilaksanakan untuk:

1. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Mengetahui realisasasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/kelauaran yang direncanakan
3. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/kelauran yang direncanakan.

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat dikethau i :

- a. Faktor faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut.

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan baru terbentuk pada tahun 2016 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

dan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk Tahun 2019 capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan mengalami kenaikan dari Tahun 2018. Adapun analisis kinerja Program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan *outcome* meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur;
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
6. Program Pengembangan perumahan;
7. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
8. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
9. Program Pengembangan Sistuim Informasi Pertanahan
10. Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan.

Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertahaan Kabupaten Pesisir Selatan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertahaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dan perkiraan target Tahun 2022.

Pada Tahun 2019 total anggaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 52.150.226.785 dengan rincian:

1. Urusan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rp. 33.195.503.869 dan terealisasi sebesar Rp. 31.248.682.644,- dengan capaian Kinerja 99.29 % (sangat tinggi) dan capaian keuangan 94.14 % (sangat tinggi), dilaksanakan melalui 9 rogtam dan 45 Kegiatan
2. Urusan Pertanahan Rp. 18.954.722.916 dan terealisasi sebesar Rp. 3.168.893.285 dengan capaian kinerja 40.97 % (sangat rendah) dan capaian keuangan sebesar 16.72 % (sangat rendah) dilaksanakan melalui 2 program dan 9 kegiatan.

Untuk Capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2020 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program/kegiatan tidak sesuai dengan target rencana disebabkan Refocussing Anggaran akibat adanya wabah Covid 19 (*Corona Virus Disese* 2019).

Faktor faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan adalah :

1. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan.
2. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia
3. Adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan yang selaras dengan pencapaian target masing masing kegiatan.

Evaluasi Hasil Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan pencapaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (terlampir)**

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis, disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -				Realisasi Capaian Tahun ke -		Proyeksi Tahun Ke -		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rasio Rumah Layak Huni (SPM)			0.218	0.221	0.2233	0.2255	0.229	0.239	0.24	0.25	
2	Rasio Permukiman Layak Huni			96.76	96.79	96.82	96.85	96.79	96.81	96.85	96.9	
3	Persentase luas Lahan Bersertifikasi (%)			46	64.34	53	57	49	64.34	65	68	

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Pencapaian RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan s/d Tahun 2020

No	Urusan/ bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (tahun lalu/n-2)			Target Program/kegiatan Tahun Berjalan (Th 2020/n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan 2020	
					Target Renja Th 2019	Realisasi Renja Th 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
I	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Pelayanan Administrasi kantor								
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Ketersediaan Air, Listrik dan jasa komunikasi			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Ketersediaan Layanan Administrasi keuangan			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantor			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
4	Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja	Ketersediaan biaya perawatan bagi peralatan kerja			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan alat tulis			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetak dan penggandaan			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
11	Penyediaan Jasa pengamanan Kantor	Ketersediaan jasa pengamanan Kantor			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
12	Pemenuhan Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah Dokumen perencanaan yang tersedia			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja								
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dibeli			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terpeliharanya Gedung kantor			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

No	Urusan/ bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (tahun lalu/n-2)			Target Program/kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2020/n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan 2020	
					Target Renja Th 2019	Realisasi Renja Th 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan kantor kantor			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terpenuhi kebutuhan peningkatan Disiplin Aparatur								
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang dibeli			4 set	4 set	100%	4 set	4 set	100%
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah aparatur yang meningkatkan kapasitasnya								
18	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mendapat/mengikuti pendidikan			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyampaian laporan kinerja dan keuangan tepat waktu								
19	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan	Jumlah Laporan yang dihasilkan			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
20	Sinkronisasi Program RPJM Cipta Karya	Jumlah Dokumen RPJM Cipta karya yang dihasilkan			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
VI	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Panjang Jalan yang terbangun								
21	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan yang dibangun untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman			6 pkt	6 pkt	100%	8 pkt	8 pkt	100%
VII	PROGRAM SALURAN DRAINASE / GORONG - GORONG	Persentase Saluran Drainase/Gorong - gorong Lingkungan kondisi baik								
22	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman	Panjang Drainase yang dibangun untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman			47 pkt	47 pkt	100%	31 pkt	31 pkt	100%
VIII	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Persentase Bangunan Pemerintah yang terbangun								
23	Pembangunan Gedung Kantor	jumlah Rumah Layak huni Aparatur yang dibangun			2 pkt	2 pkt	100%			
24	Pembangunan Rumah Dinas	jumlah Rumah Layak huni Aparatur yang dibangun			4 pkt	4 pkt	100%			
25	Rehabilitasi sedang/Berat Rumah Dinas	jumlah Rumah Layak huni Aparatur yang direhab			2 pkt	2 pkt	100%			
26	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	jumlah Rumah Layak huni Aparatur yang direhab			2 pkt	2 pkt	100%			

No	Urusan/ bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (tahun lalu/n-2)			Target Program/kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2020/n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan 2020	
					Target Renja Th 2019	Realisasi Renja Th 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	Persentase pemenuhan infrastruktur wilayah Strategis								
27	Pembangunan Jalan Minapolitan	Panjang Jalan yang dibangun untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman			1 pkt	1 pkt	100%	1 pkt	1 pkt	100%
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio Rumah layak Huni								
28	Pembangunan Rumah Tidak Layak huni dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Pembangunan /Rehabilitasi RTLH untuk MBR			431 unit	431 unit	100%	247 unit	247 unit	100%
29	Pengelolaan PSU Perumahan dan MBR	Jumlah PSU Perumahan bagi MBR yang dibangun			5 PSU	5 PSU	100%	6 PSU	6 PSU	100%
30	Pengelolaan Pembangunan Rumah Khusus dan Rumah Susun	Jumlah Rumah khusus dan Rumah susun yang dikelola			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
31	Penunjang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Jumlah Dokumen BSPPS yang tersedia			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
32	Penunjang DAK Perumahan	Jumlah Dokumen DAK Perumahan yang dihasilkan			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
33	Pengendalian Bidang Perumahan	Tertindakannya Pengendalian Bidang Perumahan			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
34	Perencanaan Bidang Perumahan	Tertindakannya Perencanaan Bidang Perumahan			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
35	DAK Perumahan	Jumlah pembangunan Rumah Layak huni untuk MBR			12 bulan	12 bulan	100%	168 unit	168 unit	100%
X	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Persentase Lingkungan permukiman kumuh								
36	Pengelolaan Air Limbah Setempat	Jumlah jamban yang dibangun untuk meningkatkan RTLH			500 unit	500 unit	100%	525 unit	525 unit	100%
XI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman Tertata								
37	Koordinasi Bidang Kawasan Permukiman	Jumlah koordinasi dan Rekomendasi untuk mencegah penurunan kualitas kawasan permukiman			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
38	Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen lingkungan yang dihasilkan untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman			54 pkt	54 pkt	100%	39 dokumen	39 dokumen	100%
39	Penunjang Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	Jumlah pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan kawasan permukiman yang dilaksanakan			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

No	Urusan/ bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (tahun lalu/n-2)			Target Program/kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2020/n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan 2020	
					Target Renja Th 2019	Realisasi Renja Th 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
40	Penyusunan DED Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Data Kawasan Permukiman			54 pkt	54 pkt	100%	40 dokumen	40 dokumen	100%
XII	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Persentase luas tanah bersertifikasi								
41	Facilitasi Pengadaan Tanah	Jumlah Fasilitas ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
42	Perencanaan Pengadaan Tanah	Jumlah Dokumen perencanaan pengadaan Tanah yang dihasilkan			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
43	Persiapan Pengadaan Tanah	Jumlah pengadaan Tanah yang dihasilkan			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
44	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	Jumlah pengadaan Tanah yang dihasilkan			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
45	Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen untuk penerbitan Sertifikat tanah Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
46	Inventarisasi Tanah Pemerintah Daerah	Jumlah Tanah yang terinventarisir			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
47	Percepatan Pelaksanaan TORA	Jumlah Data Base pertanahan			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
48	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	Jumlah Pengadaan Tanah yang Diserahkan			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
XIII	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK - KONFLIK PERTANAHAN	Penyelesaian kasus tanah negara								
49	Facilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah Penyelesaian Konflik Tanah Pemerintah Daerah yang terselesaikan			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
XIV	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	Jumlah sistem informasi yang ada								
50	Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang handal	Jumlah Data Base Pertanahan			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampak signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu – isu strategis yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Pesisir Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Isu strategis di Bidang Perumahan

- Masih banyaknya rumah yang belum layak huni
- Masih banyaknya infrastruktur PSU perumahan yang belum tertangani

2. Isu Strategis di Bidang Kawasan Permukiman

- Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh perkotaan yang belum tertangani
- Menurunnya kualitas lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan;

- Belum tersedianya peta masalah yang terukur tentang lingkungan dan kawasan permukiman kumuh untuk fasilitas penanganan kawasan kumuh

3. Isu Strategis di Bidang Pertanahan

- Penyelesaian masalah konflik pertanahan
- Tersedianya pemetaan pemanfaatan tana
- Tersertifikatkannya tanah pemerintah daerah Kab. Pesisir Selatan

II.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran prpgram dan kegiatan yang telah ditetapkam dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tahun 2021 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen rencana Kerja (renja) Tahun 2021 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capainnya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Pesisir Selatan.

Disamping itu juga, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Pesisir Selatan.

Program dan Kegiatan Tahun 2021 yang telah diusulkan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Pesisir Selatan merupakan rancangan awal Rencana Kerja (renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2021 dan telah

ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan.

Tabel. 2.4

**Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Pesisir
Selatan (terlampir)**

II.5 Penelaahan Usulan program Kegiatan Masyarakat.

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam negeri No. 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Hanya saja pada tahun 2021 ini adalah tahun transisi penggunaan atau penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri No. 90 Tahun 2019, dimana masing masing kegiatan dan sub kegiatan sudah terpetakan dengan jelas. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Pesisir Selatan terjadi perubahan pemetaaan kegiatan yang sangat signifikan dibandingkn Tahun 2020. Ada beberapa kegiatan yang tahun sebelumnya bisa dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak bisa dilaksanakan lagi Tahun 2021 karena sudah beda kewenangan.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Pesisir Selatan dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang Perumahan dan Permukiman dimana peran

masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini mengkoordinasikan prgram/kegiatan yang disuulkan oleh pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada perangkat daerah terkait.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional

II.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal rencana kerja Pemerintah Tahun 2021, adalah :

1. Prioritas Nasional 1 : Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Arah Kebijakan :

- a. percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas SDM dan peningkatan perekonomian serta peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas.
-
2. Prioritas Nasional 2 : Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman

Arah Kebijakan :

- a. Pengurangan disparitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan perekonomian dan pemerataan jaringan teknologi komunikasi dan informatika

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pesisir Selatan, yaitu

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”

yang dijabarkan sebagai berikut :

- Mandiri : berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal
- Unggul : masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul

Agamis : suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.

Sejahtera : perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun kedepan, maka untuk **MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA** dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi yaitu :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Dari ke lima misi Kabupaten Pesisir Selatan tersebut di atas, maka **misi kedua** adalah misi yang harus diemban Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Misi kedua tersebut untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur

perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah

Untuk menterjemahkan Visi dan misi pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan maka dapat ditelaah dari **misi kedua**.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Kerja (Renja) diperlukan straregi. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dari analisis lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten pesisir selatan sebagai berikut :

- 1) Sasaran 1 : Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni
- Strategis : Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatkan kesesuaian pembangunan perumahan dengan perencanaan, meningkatkan ketersediaan rumah layak bagi aparatur.
- Kebijakan : Dengan melaksanakan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) di Kab. Pesisir Selatan, melakukan kevalidan data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pembangunan baru (*Backlog*) Perumahan, pelaksanaan pembangunan perumahan yang sesuai standar teknis, meningktanya pengendalian dan pengawasan pembangunan perumahan, pembangunan rumah bagi aparatur, dan fasilitasi penyediaan rumah layak bagi aparatur di

kabupaten Pesisir Selatan.

2) Sasaran 2 : Meningkatnya kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan

Strategis : Meningkatkan penataan kawasan permukiman dan berkurangnya luas kawasan kumuh.

Kebijakan : Pencegahan kawasan kumuh dan Pencegahan penurunan kualitas kawasan permukiman dengan melaksanakan sosialisasi, penhgendalian dan pengawasan, peningkatan kualitas kawasan kumuh dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan melaksanakan perbaikan dan pembangunan pada tujuh indikator kawasan kumuh(bangunan tidak teratur, jalan lingkungan yang tidak layak, drainase, pengelolaan air limbah, persampahan, air bersih dan fasilitas pemadam kebakaran), dan tersedianya dokumen perencanaan kawasan.

3) Sasaran 3 : Terwujudnya kepastian hukum pemilikan tanah di Kabupaten Pesisir Selatan.

Strategis : Meningkatkan pemetaan pemanfaatan lahan dan meningkatnya sertifikat tanah pemerintah daerah Pesisir Selatan.

Kebijakan : Terlaksananya inventarisasi tanah, melakukan penerbitan rekomendasi ijin pertanahan, terfasilitasinya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, serta terfasilitasinya konflik pertanahan di kabupaten Pesisir Selatan.

III.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Telaah Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari tingkat Nagari hingga tingkat Kabupaten melalui Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan (MUSRENBANG) Tahun 2020. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan. Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif atau reses. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar yang dilayani oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah pembangunan rumah tidak layak huni, pembuatan MCK Pembangunan Psarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan, sehingga dalam setiap kesempatan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan selalu menyangkut atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberi usulan atau aspirasi atas kebutuhan di daerahnya melalui kebijakan kebijakan dari para pemangku kepentingan yang nantinya harus dialokasikan dalam rencana kerja OPD untuk tahun anggaran yang akan datang bahkan dalam tahun anggaran berjalan.

3.3.2 Perumusan Kegiatan Prioritas

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 sebagai wujud implementasi peran tugas pokok dan tanggung jawab dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu daerah otonom. Selain itu

sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang menuju ke arah yang lebih baik sesuai visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021.

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan
Perkiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Pesisir Selatan (Terlampir)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Prioritas	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,106,600,000				1,275,000,000	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ketersediaan Air, Listrik dan jasa komunikasi	IV Jurai	12 Bulan	85,300,000	APBD		12 Bulan	86,000,000	
2	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	ketersediaan layanan administrasi keuangan	IV Jurai	12 Bulan	416,300,000	APBD		12 Bulan	290,000,000	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantor	IV Jurai	12 Bulan	63,500,000	APBD		12 Bulan	76,000,000	
4	Penyediaan Alat tulis Kantor	ketersediaan alat tulis	IV Jurai	12 Bulan	46,000,000	APBD		12 Bulan	50,000,000	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetak dan penggandaan	IV Jurai	12 Bulan	31,000,000	APBD		12 Bulan	40,000,000	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	IV Jurai	12 Bulan	7,000,000	APBD		12 Bulan	12,000,000	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu	IV Jurai	12 Bulan	20,000,000	APBD		12 Bulan	35,000,000	
8	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	IV Jurai	12 Bulan	274,000,000	APBD		12 Bulan	300,000,000	
9	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	IV Jurai	12 Bulan	79,000,000	APBD		12 Bulan	75,000,000	
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor	IV Jurai	12 Bulan	-	APBD		12 Bulan	150,000,000	
11	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	ketersediaan biaya perawatan bagi peralatan kerja	IV Jurai	12 Bulan	8,000,000	APBD		12 Bulan	11,000,000	
12	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	IV Jurai	12 Bulan	76,500,000	APBD		12 Bulan	150,000,000	
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				554,000,000				679,000,000	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Prioritas	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				554,000,000				679,000,000	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Opeastional	IV Jurai	12 Bulan	85,000,000	APBD		12 Bulan	90,000,000	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan Kantor	IV Jurai	12 Bulan	16,000,000	APBD		12 Bulan	19,000,000	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	IV Jurai	12 Bulan	65,000,000	APBD		12 Bulan	150,000,000	
4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IV Jurai	bh.....unit	200,000,000	APBD		bh..... unit.....	200,000,000	
5	Pengadaan Mobilier	Tersedianya Mobilier	IV Jurai	...unit	67,000,000	APBD		...unit	60,000,000	
6	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional dibeli	IV Jurai	3 unit	60,000,000	APBD		2 unit	60,000,000	
7	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor di beli	IV Jurai	unit	61,000,000	APBD		unit	100,000,000,00	
III	Peningkatan Disiplin Aparatur				3,000,000				4,000,000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas yang dibeli	IV Jurai	100%	3,000,000	APBD		100%	4,000,000	
IV	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50,000,000				50,000,000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mendapat / mengikuti pendidikan	IV Jurai	100%	50,000,000	APBD		100%	50,000,000	
V	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				80,800,000				155,000,000	
1	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	IV Jurai	12 bulan	60,000,000	APBD		12 bulan	100,000,000	
2	Sinkronisasi Program RPJPM Cipta Karya	Tersedianya Sinkronisasi Program RPJPM Cipta Karya	IV Jurai	1 Dokumen	20,800,000	APBD		1 Dokumen	55,000,000	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Prioritas	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
VI	Penataan Bangunan dan Lingkungan				-					
1	Pembangunan Rumah Dinas	Tersedianya Rumah Dinas Aparatur	Pessel	1 pkt	-			pkt	-	
	Pembangunan Rumah Dinas Camat Silaut		Silaut		-	APBD				
	Pembangunan Rumah Dinas Camat IV Jurai		IV Jurai			APBD				
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Tersedianya Rehab Sedang/Berat Rumah Dinas Aparatur		1 pkt	-					
	rehabilitasi Rumah Dinas Camat Sutera		Sutera			APBD				
	rehabilitasi Rumah Dinas Camat Bayang Utara		Bayang utara			APBD				
	rehabilitasi Rumah Dinas Camat Lengayang		Lengayang			APBD				Usulan Pra Musrenbang RKPD
VII	Pengembangan Perumahan				29,951,000,000				24,580,000,000	
1	Pengelolaan PSU Perumahan dan MBR	Terlaksananya Pengelolaan PSU Perumahan dan Fasilitas Sambilan Listrik MBR	Pessel	6 PSU , 450 Sambilan Listrik	8,520,000,000	APBD		1. fasilitator...	10,000,000,000	Fasilitas Sambilan Listrik MBR berada di Kawasan Kumuh
	perumahan Bunga Pasang asri Kec. IV Jurai		IV Jurai	1. Jalan 2. Drainase	500,000,000	APBD		1. Jalan 2. Drainase		OPD
	Perumahan Faray Permai		IV Jurai	1. Jalan 2. Drainase	200,000,000	APBD				
	Perumahan Ochien kec. IV Jurai		IV Jurai	1. Jalan 2. Drainase	200,000,000	APBD				
	Perumahan Bintang satu kec. Linggo Sari baganti		Linggo Sari Baganti	1. Jalan 2. Drainase	150,000,000	APBD				

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Prioritas	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
	Perumahan Alam Surambi Permat. kec. Bayang		Bayang	1. Jalan 2. Drainase	200,000,000	APBD				
	Perumahan Buni Kambang Asri Kec. Lenggayang		Lenggayang	1. Jalan 2. Drainase	150,000,000	APBD				
	Fasilitasi Sambungan Listrik Rumah MBR		Tersebar	840 Unit	3,000,000,000	APBD				
	PSU Perumahan				4,120,000,000					
2	Pengelolaan Pembangunan Rumah Khusus dan Rumah Susun	Terlaksananya Pengelolaan Pembangunan Rumah Khusus dan Rumah Susun	Kab. Pessel	100%	164,000,000	APBD		1. fasilitator... 2. rumah....	175,000,000	
3	Penunjang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Penunjang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Kab. Pessel	1. fasilitator... 2. rumah....	196,000,000	APBD		100%	200,000,000	
4	Pembangunan Rumah Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Pembangunan Rumah Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Pessel	450 unit, Honorarium Korfas dan Fasilitator	12,045,000,000	APBD			10,000,000,000	Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha
5	Pembangunan Rumah Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Dampak Bencana)	Pembangunan Rumah Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Pessel	450 unit, Honorarium Korfas dan	5,600,000,000	APBD			10,000,000,000	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana
6	Penunjang DAK Perumahan	Penunjang DAK Perumahan	Kab. Pessel	100%	32,000,000	APBD			35,000,000	
7	Pengendalian Bidang Perumahan	Pengendalian Bidang Perumahan	Kab. Pessel	100%	53,000,000	APBD			60,000,000	
8	Perencanaan Bidang Perumahan	Perencanaan Bidang Perumahan	Kab. Pessel	100%	107,000,000	APBD			110,000,000	
9	Pembangunan Rumah Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Dampak Bencana Kawasan Kumuh Perkotaan)	DAK Perumahan	Kab. Pessel	100%	3,234,000,000	APBD			4,000,000,000	Kawasan Kumuh Perkotaan (DAK Perumahan)
VIII	Lingkungan Sehat Perumahan				-				7,000,000,000	
1	Pengelolaan Air Limbah Setempat	Tersedianya Pengelolaan Air Limbah Setempat	Kab. Pessel	rumah, Honorarium korfas dan	-	APBD			7,000,000,000	Penanganan Kawasan Kumuh 9 Nagari @ nagari 50 Unit

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Prioritas	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
IX	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong									
1	Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Lingkungan	Tersedianya Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Lingkungan	Tersebar	± 4988 m						
	Peningkatan Infrastruktur Drainase/ Jalan Pada Kawasan Kumuh Prioritas Kewenangan Kabupaten									
	1 Pembangunan Drainase Nagari Sago		IV Jurai							
	2 Pembangunan Drainase Nagari Lumpo		IV Jurai							
	3 Pembangunan Drainase Nagari Taluak		Batang Kapas							
	4 Pembangunan Drainase Nagari Aur Duri Surantih		Sutera							
	5 Pembangunan Drainase Nagari Nyiur Melambai		Ranah Pesisir							
	6 Pembangunan Drainase Nagari Air haji		Linggo sari Baganti							
	7 Pembangunan Drainase Nagari Muara Sakai Inderapura		Puncung soal							
	8 Pembangunan Drainase Nagari Talang Balarik Tapan		Ranah IV Hulu Tapan							
	Peningkatan Infrastruktur Drainase Pada Kawasan Kumuh Non Prioritas Kewenangan Kabupaten									
	1 Pembangunan Drainase Nagari Barung-Barung Belantai		koto XI Tarusan							
	2 Pembangunan Drainase Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih		Sutera							
	3 Pembangunan Drainase Nagari Muara Kandis Punggasan		Linggo sari baganti							
	4 Pembangunan Drainase Nagari Tigo Sepakat Inderapura		pancing soal							
	Peningkatan Infrastruktur Drainase Pada Kawasan Kumuh NON Kewenangan Kabupaten									
	1 Pembangunan Drainase Nagari Koto Berapak		Bayang							
	2 Pembangunan Drainase Nagari Kubang Koto Barapak		Bayang							
	3 Pembangunan Drainase Nagari Surantih		Sutera							

[illegible]

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Prioritas	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan	Tersedianya Pengadaan Jalan Lingkungan	Tersebar							
A	Peningkatan Infrastruktur Jalan Pada Kawasan Kumuh Prioritas Kewenangan Kabupaten									
1	Pembangunan Jalan Lingkungan Nagari Sago		IV Jurai							
2	Pembangunan Jalan Lingkungan Nagari Lumpo		IV Jurai							
3	Pembangunan Jalan Lingkungan Nagari Taliuk		Batang kapas							
4	Pembangunan Jalan Lingkungan Nagari Aur		Sutera							
6	Duri Surantih		Ramah pesisir							
7	Melambai		Linggo sari							
8	Pembangunan Jalan Lingkungan Nagari Air haji		baganti							
9	Pembangunan Jalan Lingkungan Nagari Muara		pancing soal							
	Sakai inderaura		Ramah IV Hulu							
	Pembangunan Jalan Lingkungan Nagari Talang		tanah							
	Balarik tapan									
	Peningkatan Infrastruktur Jalan Pada Kawasan Kumuh Non Prioritas Kabupaten									
	Pembangunan Jalan Lingkungan Nagari Rawang		Sutera							
	Gumung Malelo Surantih		Linggo sari							
	Pembangunan Jalan Lingkungan Nagari Muara		baganti							
	Kandis Pungwasan		pancing soal							
	Pembangunan Jalan Lingkungan Nagari Tiga									
	Serakat inderaura									
	Peningkatan Infrastruktur Jalan Pada Kawasan Kumuh NON Kewenangan Kabupaten									
	Pembangunan Jalan Lingkungan Nagari Koto Berapak		Bayang							
	Pembangunan Jalan Lingkungan Nagari Kubang Koto Berapak		Bayang							
	Pembangunan Jalan Lingkungan Nagari Salido		IV Jurai							
	Pembangunan Jalan Lingkungan Nagari Kambang Utara		Lengayang							
	Pembangunan Jalan Lingkungan Nagari Kambang		Lengayang							

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Prioritas	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Nagari Lakitan		Lengayang							
	Pembangunan Jalan Lingkungan Nagari Punggasan Utara		linggo sari boganti							
	Pembangunan Jalan Lingkungan Nagari Rantau Simalenang Air haji		linggo sari boganti							
	Pembangunan Jalan Lingkungan Nagari Tanah Bakali Inderapura		Air Pura							
	Peningkatan Infrastruktur Jalan NON Kawasan Kumuh									
	Pembangunan Jalan Lingkungan Belakang Kantor Wali Nagari IV Koto Hilie		Batang Kapas							
	Pembangunan Jalan Lingkungan Nagari Sungai Sirah LSB		Linggo sari boganti							
	Pembangunan Jalan Lingkungan Palak Pisang Koto Merupak		Bayang							
	Pembangunan Jalan Sungai Sirah Kecamatan Sutera		Sutera							
XI	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh									
1	Pembangunan Jalan Minalopolitan	Tersedianya jalan minapolitan (DDUB)								
XII	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman									
1	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Kawasan Permukiman	Tersedianya Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Kawasan Permukiman	Pessel	100%	70,000,000	APBD		20%	80,000,000	
2	Penyusunan DED Kawasan Permukiman	Terlaksananya DED Kawasan Permukiman	Pessel	Dokumen Perencanaan	400,000,000	APBD			300,000,000	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Prioritas	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	Penyusunan DED Kawasan Kumuh	Terlaksananya DED Kawasan Kumuh	Pessel	Dokumen Perencanaan	1,900,000,000	APBD			2,500,000,000	
3	Peningkatan perencanaan pembangunan kawasan permukiman dan pengembangan kawasan permukiman	Terlaksananya perencanaan pembangunan kawasan permukiman dengan tupoksi kawasan permukiman	Pessel	100%	80,000,000	APBD		50%	80,000,000	
4	Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Permukiman	Tersedianya Dokumen Lingkungan Kawasan Permukiman	Pessel	UKL/UPL dan SPPL		APBD			600,000,000	
5	Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman	Tersedia Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman	Pessel	100%	107,000,000	APBD			150,000,000	
6	Penyusunan Dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP)	Tersedianya Dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Pessel	100%	800,000,000	APBD				
7	Penyusunan Profil Kawasan Kumuh	Tersedianya Profil Kawasan Kumuh	Pessel	100%	200,000,000	APBD				
XIII	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				20,633,300,000				18,835,500,000	
1	Fasilitasi Pengadaan tanah	Terfasilitasinya Pengadaan tanah	pessel	5 fasilitasi	100,000,000	APBD		100%	150,000,000	
2	Perencanaan Pengadaan tanah	Tersedianya Perencanaan Pengadaan tanah	Pessel	1 dokumen	100,000,000	APBD			110,000,000	
3	Persiapan Pengadaan Tanah	Tersedianya Persiapan Pengadaan Tanah	Pessel	1 penetapan lokasi	122,000,000	APBD			200,000,000	
4	Pelaksanaan pengadaan Tanah	Tersedianya Tanah untuk Pembangunan	pessel	4 pengadaan	19,652,000,000	APBD		1.... pilar 2.... plank pemberitahu	17,000,000,000	
5	Penyerahan Hasil pengadaan Tanah	Tersedianya Penyerahan Hasil pengadaan Tanah	pessel	4 sertifikat	100,000,000	APBD		1.... pilar.... 2.... plank pemberitahu	700,000,000	
6	Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah	Terlaksananya sertifikat tanah hak milik Pemda	pessel	30 Sertifikat	295,000,000	APBD			350,000,000	
7	Inventarisasi Tanah Pemerintah Daerah	Tersedianya Monitoring dan Evaluasi Aset Tanah Pemda	Pessel	182 persil	146,000,000	APBD			175,500,000	
8	Percepatan Pelaksanaan TORA	Percepatan Pelaksanaan TORA	pessel	100%	118,300,000	APBD			150,000,000	